

NILAI STRATEGIS KUNJUNGAN PRESIDEN JOKO WIDODO KE NEGARA-NEGARA ASIA SELATAN

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan, pada minggu keempat bulan Januari 2018, selama sekitar satu minggu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kunjungan yang dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk memperkuat persahabatan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama. Kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini tidak cukup dipahami sebagai kunjungan diplomasi kenegaraan, tetapi juga perlu dipahami nilai strategisnya bagi Indonesia. Nilai strategis dari kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut antara lain terbukanya peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan. Sementara nilai strategis secara politik dan keamanan dari kunjungan Presiden tersebut adalah semakin diakuinya peran Indonesia dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan dan global. Kunjungan konstruktif Presiden ke negara-negara Asia Selatan tersebut sudah seharusnya mendapat dukungan parlemen (DPR RI), terlebih hal itu mengandung nilai strategis bagi Indonesia.

Pendahuluan

Pada tanggal 24 sampai dengan 29 Januari 2018 Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke lima negara yang berada di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan hubungan diplomasi Indonesia agar tidak selalu terarah ke negara-negara

Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat, tetapi juga perlu diarahkan untuk melihat potensi negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Selatan sekaligus menjalankan misi untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama.

Dalam kunjungan luar negerinya tersebut, Presiden Joko Widodo secara khusus juga telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India pada



25-26 Januari 2018 di New Delhi. Kesempatan tersebut juga telah dimanfaatkan oleh Presiden untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, dalam rangka penguatan kerja sama Indonesia-India. Sebagai salah satu negara di Asia Selatan dengan jumlah penduduknya yang terbesar kedua di dunia (setelah China), India merupakan pasar potensial bagi perekonomian Indonesia. Sebagai dua negara besar yang berada di jalur Samudera Hindia, Indonesia dan India juga dapat meningkatkan kerja sama maritim.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Asia Selatan tidak cukup dipahami sebagai kunjungan diplomasi kenegaraan, tetapi juga perlu dilihat nilai strategisnya bagi Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi, politik, dan keamanan. Hal itulah yang akan diungkap dan dibahas oleh penulis melalui tulisan ini. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu pelaksanaan dan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan tersebut.

Memperkuat Persahabatan dan Kerja Sama

Sri Lanka menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke negara-negara Asia Selatan. Kunjungan yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2018 tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Terkait kerja sama pembangunan

infrastruktur, PM Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengapresiasi keterlibatan Indonesia dalam pembangunan jalan layang yang terdapat di ibu kota Sri Lanka, Kolombo. Indonesia dan Sri Lanka juga sepakat bekerja sama dalam pengadaan alat transportasi, khususnya kereta. Terkait hal ini, pihak Sri Lanka pada tahap awal akan membeli 60 gerbong kereta dari Indonesia. Kerja sama maritim juga menjadi isu yang dibahas dan kedua belah pihak sepakat meningkatkan kerja sama.

Seusai berkunjung ke Sri Lanka, Presiden Joko Widodo menuju India. Di India, Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN-India. Dalam KTT, Joko Widodo mengemukakan keyakinannya bahwa ASEAN dan India dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudera Hindia. Sementara dalam pertemuan bilateralnya dengan PM India, Narendra Modi, dicapai kesepakatan peningkatan kerja sama ekonomi. Terkait kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan, Joko Widodo sangat mengharapkan pemerintah India dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif India yang cukup tinggi terhadap komoditas *vegetables oil* yang masuk ke India. Bidang maritim juga menjadi perhatian kedua negara. Terkait hal ini, kedua belah pihak sepakat memperkuat kerja sama melalui forum Indian Ocean Rim Association (IORA).

Dari India, Presiden Joko Widodo menuju Pakistan. Fokus utama kunjungan adalah peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya bidang energi dan perdagangan. Sejalan dengan fokus tersebut, kedua negara (diwakili menteri masing-

masing) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bidang Energi dan Amandemen Protokol *Preferential Trade Agreement* (PTA). Di bidang energi, Indonesia akan memasok LNG ke Pakistan guna mendukung ketahanan energi negara tersebut. Hubungan ekonomi kedua negara juga diperkuat dengan penandatanganan MoU Kerja Sama Promosi Perdagangan. Sebelum mengakhiri kunjungan, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di hadapan Sidang Gabungan (*Joint Sitting*) Parlemen Pakistan. Joko Widodo merupakan Presiden Indonesia kedua, setelah Presiden Soekarno pada tahun 1963, yang mendapat kehormatan menyampaikan pidato di hadapan sidang Parlemen Pakistan.

Bangladesh menjadi tujuan kunjungan Presiden Joko Widodo berikutnya. Kunjungan ke Bangladesh selain dimaksudkan untuk memperkuat persahabatan dan meningkatkan kerja sama ekonomi, juga mengandung misi kemanusiaan yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya (asal Rakhine Myanmar) yang tinggal di tempat penampungan pengungsi di Distrik Cox's Bazar, Bangladesh. Terkait kerja sama ekonomi, Presiden Joko Widodo dan PM Bangladesh, Sheikh Hasina, sepakat meningkatkan kerja sama. Peluang peningkatan kerja sama cukup terbuka jika memerhatikan nilai perdagangan kedua negara tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,96% atau senilai 1,53 miliar dolar AS (*The Jakarta Post*, 29 Januari 2018). Terkait pengungsi Rohingya, Presiden Joko Widodo secara simbolis telah memberikan paket bantuan kemanusiaan, antara lain

sarung, selimut, dan perlengkapan sekolah. Bantuan kemanusiaan lain diberikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan kebutuhan mendesak para pengungsi.

Dari Bangladesh, Presiden Joko Widodo menuju Afghanistan, negara terakhir yang dikunjungi dalam lawatannya ke negara-negara Asia Selatan. Kunjungan ke Afghanistan dilakukan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Januari 2018 di tengah situasi Kota Kabul (Ibu Kota Afghanistan) yang tidak kondusif setelah peristiwa serangan bom bunuh diri yang terjadi dua hari sebelumnya. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan, meskipun hanya 6 jam dan dalam situasi Kota Kabul yang mencekam, tetap mendapatkan sambutan hangat dari tuan rumah. Kunjungan Joko Widodo ke Afghanistan lebih ditujukan pada upaya untuk membangun kerja sama dalam pembangunan perdamaian. Kedua belah pihak, Presiden Joko Widodo dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, sepakat bahwa pembangunan perdamaian di Afghanistan harus ditopang dengan pembangunan ekonomi.

Nilai Strategis Kunjungan

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Asia Selatan tidak cukup hanya dipahami sebagai kunjungan diplomasi kenegaraan, tetapi juga perlu dilihat nilai strategisnya bagi Indonesia. Nilai strategis yang utama sudah tentu adalah semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dengan negara-negara yang dikunjungi Presiden. Dengan semakin eratnya hubungan persahabatan itu, timbul

keinginan dari negara-negara tersebut untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Mereka menaruh harapan dan ingin melihat peluang yang lebih besar dalam membangun kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Nilai strategis secara ekonomi inilah yang antara lain terlihat dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Asia Selatan.

Sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, potensi kerja sama ekonomi sangat menjanjikan, mulai dari kerja sama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan alat transportasi (kereta), kebutuhan energi, ekspor *vegetables oil* (khususnya minyak kelapa sawit), dan perdagangan secara umum. Hal itu terlihat dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Sri Lanka, India, Pakistan, dan Bangladesh. Khusus India, bahkan menjadi catatan tersendiri, karena negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia ini (lebih dari 1 miliar jiwa) merupakan pasar yang besar dan potensial. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa potensi kerja sama perdagangan Indonesia-India bisa mencapai lebih dari 2,1 miliar dolar AS setelah pertemuan kedua negara. Ini artinya, pasar India yang potensial, dan kebutuhan ekonomi negara-negara Asia Selatan yang cukup besar harus dimanfaatkan oleh Indonesia melalui peningkatan kerja sama ekonomi secara bilateral dengan negara-negara tersebut.

Kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo di atas sudah tentu juga memiliki nilai strategis secara politik dan keamanan bagi Indonesia, khususnya dalam

kunjungan ke Bangladesh dan Afghanistan. Nilai strategis secara politik dan keamanan tersebut adalah adanya pengakuan dari negara-negara yang dikunjungi Presiden terhadap peran politik Indonesia dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Dalam kasus pengungsi Rohingya, misalnya, jika persoalan ini tidak diatasi dengan baik secara politis, dan mengabaikan aspek keamanan, bukan tidak mungkin persoalannya akan mengganggu keamanan kawasan, dan hal itu sudah terlihat beberapa waktu lalu ketika beberapa negara ASEAN dibanjiri arus pengungsi Rohingya. Nilai strategis ini juga terlihat dari kunjungan Presiden ke Afghanistan. Pemerintahan di Kabul sangat mengapresiasi dan mengakui peran Indonesia dalam membangun keamanan dan perdamaian di Afghanistan.

Nilai strategis secara politik dan keamanan juga dapat dikaitkan dengan kepentingan Indonesia yang lebih luas di kawasan, yakni tentang pentingnya membangun ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan, yang dikenal dengan ide kerja sama Indo-Pasifik. Ide yang berasal dari pemikiran mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa ini tujuan awalnya adalah adanya keinginan Indonesia agar interaksi negara-negara di lingkaran Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tidak dikendalikan oleh hasrat mencapai keseimbangan kekuatan atau *balance of power*, tetapi *dynamic equilibrium* atau keseimbangan yang dinamis, dengan mengakomodasi kepentingan semua negara besar (Natalegawa, 2017: 232-238).

Dikaitkan dengan peran positif Indonesia selama ini dalam memelihara stabilitas keamanan di kawasan, sangat masuk akal apabila Indonesia sebagai kekuatan konstruktif dan moderat di Asia, serta sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, mempromosikan kerja sama Indo-Pasifik yang inklusif, terbuka, dan komprehensif. Kerja sama ini diharapkan bisa diterima semua pihak karena tidak mengutamakan kontestasi kekuatan (*struggle of power*), tetapi membangun ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Kerja sama seperti inilah sesungguhnya yang ingin dipromosikan Indonesia melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Asia Selatan.

Kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Asia Selatan tersebut sudah tentu perlu mendapat dukungan parlemen (DPR RI), terlebih hal itu mengandung nilai strategis bagi Indonesia. Dukungan DPR RI dapat dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen, khususnya melalui kunjungan Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI ke parlemen negara-negara Asia Selatan, atau sebaliknya, pada saat DPR RI menerima kunjungan parlemen negara-negara Asia Selatan. Melalui diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat meminta komitmen parlemen negara-negara Asia Selatan untuk mendukung upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah mereka dalam memperkuat kerja sama bilateralnya dengan Indonesia.

Penutup

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Asia Selatan, selain semakin memperkuat

persahabatan Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan itu, juga telah mengungkap potensi kerja sama ekonomi sebagai nilai strategis yang perlu dikembangkan lebih jauh oleh Indonesia melalui peningkatan hubungan bilateralnya dengan negara-negara Asia Selatan. Kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut juga semakin menegaskan peran politik Indonesia dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, khususnya dalam kunjungan ke Bangladesh dan Afghanistan.

Dalam konteks yang lebih luas, kunjungan Presiden Joko Widodo juga dapat dimaknai secara strategis untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo yang konstruktif dan dalam kerangka penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Asia Selatan tersebut, perlu didukung DPR RI melalui aktivitas diplomasi parlemen.

Referensi

- “Enam Jam Presiden Indonesia di Kabul”, *Kompas*, 30 Januari 2018, hal. 1.
- “Indonesia, Bangladesh agree to boost economic ties”, *The Jakarta Post*, 29 Januari 2018, hal. 12.
- “Jokowi to visit S. Asia as RI jumpstarts Indo-Pacific strategy”, *The Jakarta Post*, 19 Januari 2018, hal. 12.
- “Jokowi calls for conclusion to ASEAN-India Talks”, *The Jakarta Post*, 26 Januari 2018, hal. 11.
- Natalegawa, RM Marty M. “The Expansion of Asean and the changing Dynamics of Southeast Asia”, *Contemporary Southeast*

Asia; Singapore, Vol. 39, 2017: 232-238.

“Potensi Ekonomi Asia Selatan Terus Dijajaki”, *Bisnis.com.*, 25 Januari 2018, <http://industri.bisnis.com/read/20180125/12/730424/potensi-ekonomi-asia-selatan-terus-dijajaki> - diakses 29 Januari 2018.

“Potensi Kerja sama Perdagangan Indonesia-India Tembus Rp28,35 Triliun”, *Economy.okezone.com.*, 26 Januari 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/01/26/320/1850645/potensi-kerjasama-perdagangan-indonesia-india-tembus-rp28-35-triliun>-diakses 29 Januari 2018.

“Presiden Jokowi Temui Pengungsi Rohingya”, *Republika*, 29 Januari 2018, hal. 1.

“Presiden Jokowi Hopes ASEAN-India Partnership Can Create Stable Indo-Pacific Region”, *Setkab.go.id.*, 25 Januari 2018, <http://setkab.go.id/en/president-jokowi-hopes-asean-india-partnership-can-create-stable-indo-pacific-region/> - diakses 29 Januari 2018.



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986 dan pendidikan S2 Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kejahatan Transnasional Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Upaya Penanganannya secara Regional di Asia Tenggara” (2011), “Sengketa Laut China Selatan dan Solusi Damai ASEAN” (2013), dan “DPR RI dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen” (2014).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.